

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 236 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cicalengka untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Cicalengka, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cicalengka untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Cicalengka untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Cicalengka;
(2) Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Cicalengka tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cicalengka;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Cicalengka dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Cicalengka;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Cicalengka yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Cicalengka digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Cicalengka selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN CICALENGKA

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 disusun dengan sistemika :
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Cicalengka tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Cicalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN CICALENGKA

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Cicalengka menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Cicalengka meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Cicalengka sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cicalengka;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;

c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Cicalengka dengan DPRD; dan
d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Cicalengka.

Pasal 7

(1) Kecamatan Cicalengka membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Cicalengka.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Cicalengka disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Cicalengka tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Cicalengka melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Cicalengka dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Cicalengka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cicalengka terhadap pelaksanaan dan hasil Kecamatan Cicalengka.

(3) Camat Cicalengka menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Cicalengka.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Cicalengka dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CICALENGKA

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Cicalengka dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cicalengka beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Cicalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Cicalengka tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 236

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 236 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CICALENGKA TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Akhir Renja Kecamatan Cicalengka tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan sampai dengan Renja Tahun 2026.

Peraturan Bupati Bandung No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Cicalengka Tahun 2021-2026 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Cicalengka, sesuai dengan rencana program prioritas.

Renstra Kecamatan Cicalengka menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 yang disusun ke dalam Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026, selaras dengan Perubahan Renstra Kecamatan Cicalengka Tahun 2026-2030.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Cicalengka berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Cicalengka tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah-masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 sehingga diharapkan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cicalengka .

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2022 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Cicalengka Tahun 2021-2026;
13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 138/Kep.316-TAPEM/2022 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamataan Se- Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

a) Maksud

Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

b) Tujuan

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2026, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2024.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Kecamatan Cicalengka

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024

Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan SKPD Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024, diukur sampai tingkat output dari kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur.

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	(%)
7.01	KECAMATAN CICALENGKA	Rp 6.047.541.383	Rp 5.900.063.218	97,56%..
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.144.944.483	Rp 4.997.700.018	97,14%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.410.000,00	Rp 50.407.600,00	100,00%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 25.000.000,00	Rp 24.999.800,00	100,00%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 15.000.000,00	Rp 14.999.600,00	100,00%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.470.000,00	Rp 3.469.600,00	99,99%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.470.000,00	Rp 3.469.000,00	99,97%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 3.470.000,00	Rp 3.469.600,00	99,99%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.148.793.072	Rp 4.047.974.030	97,57%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.134.873.072,00	Rp 4.034.054.830,00	97,56%
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 3.480.000,00	Rp 3.479.800,00	99,99%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.480.000,00	Rp 3.479.800,00	99,99%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 3.480.000,00	Rp 3.479.800,00	99,99%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 3.480.000,00	Rp 3.479.800,00	99,99%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 11.500.000	Rp 11.470.000	99,74%
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 11.500.000,00	Rp 11.470.000,00	99,74%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 130.555.811	Rp 129.509.600	99,20%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.000.000,00	Rp 3.998.800,00	99,97%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 48.343.400,00	Rp 48.271.600,00	99,85%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.000.000,00	Rp 7.962.700,00	99,53%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 31.759.000,00	Rp 31.758.800,00	100,00%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 4.687.411,00	Rp 4.649.000,00	99,18%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	(%)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 22.976.000,00	Rp 22.127.100,00	96,31%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 10.790.000,00	Rp 10.741.600,00	99,55%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 34.156.600	Rp 34.155.600	100,00%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp 18.156.600,00	Rp 18.156.000,00	100,00%
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 16.000.000,00	Rp 15.999.600,00	100,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 300.977.000	Rp 264.961.027	88,03%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp -	Rp -	0,00%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 52.617.000,00	Rp 41.211.027,00	78,32%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 248.360.000,00	Rp 223.750.000,00	90,09%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 468.552.000	Rp 459.222.161	98,01%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 68.200.000,00	Rp 60.659.500,00	88,94%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 12.000.000,00	Rp 11.780.000,00	98,17%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000,00	Rp 199.471.939,00	99,74%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 188.352.000,00	Rp 187.310.722,00	99,45%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 387.290.000	Rp 387.289.200	100,00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 4.230.000	Rp 4.229.800	100,00%
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 4.230.000,00	Rp 4.229.800,00	100,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 18.400.000	Rp 18.400.000	100,00%
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp 7.300.000,00	Rp 7.300.000,00	100,00%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 11.100.000,00	Rp 11.100.000,00	100,00%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 5.775.000	Rp 5.775.000	100,00%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	(%)
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp 5.775.000,00	Rp 5.775.000,00	100,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 358.885.000	Rp 358.884.400	100,00%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 358.885.000,00	Rp 358.884.400,00	100,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 164.817.000	Rp 164.635.200	99,89%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 92.008.000	Rp 91.827.000	99,80%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	100,00%
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	100,00%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 87.508.000,00	Rp 87.327.000,00	99,79%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 72.809.000	Rp 72.808.200	100,00%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 33.575.000,00	Rp 33.574.600,00	100,00%
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Rp 2.000.000,00	Rp 1.999.600,00	99,98%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 25.650.000,00	Rp 25.650.000,00	100,00%
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 11.584.000,00	Rp 11.584.000,00	100,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 71.763.000	Rp 71.762.400	100,00%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 35.250.000	Rp 35.249.800	100,00%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 20.505.000,00	Rp 20.505.000,00	100,00%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 14.745.000,00	Rp 14.744.800,00	100,00%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 36.513.000	Rp 36.512.600	100,00%
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 36.513.000,00	Rp 36.512.600,00	100,00%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	(%)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 96.748.900	Rp 96.748.000	100,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 96.748.900	Rp 96.748.000	100,00%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp 44.470.900,00	Rp 44.470.400,00	100,00%
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 14.778.000,00	Rp 14.777.800,00	100,00%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 37.500.000,00	Rp 37.499.800,00	100,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 181.978.000	Rp 181.928.400	99,97%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 181.978.000	Rp 181.928.400	99,97%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 96.180.000,00	Rp 96.179.800,00	100,00%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 31.180.000,00	Rp 31.179.600,00	100,00%
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 54.618.000,00	Rp 54.569.000,00	99,91%
JUMLAH TOTAL		Rp 6.047.541.383	Rp 5.900.063.218	97,56%

Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Cicalengka Tahun Anggaran 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut: Anggaran belanja terealisasi sebesar Rp 5.900.063.218,00 atau sebesar 97,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.047.541.383,00.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2024 masih terdapat hambatan dan kendala diantaranya :

a) Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada :
   1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terdapat perbedaan yang mencolok antara pajak kendaraan yang ada di SSH dengan pembayaran pajak yang sebenarnya sehingga anggaran tidak terserap seluruhnya;

2. Demikian juga pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, karena adanya potongan pembayaran listrik yang ada dirumah dinas (karena Rumdin masih 450 Watt) sehingga anggaran yang telah ditetapkan menjadi tidak terserap;

Dari hasil Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar penyebab tidak terserapnya anggaran adalah karena hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga penanganannya pun agak susah dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka disusunlah strategi pemecahan hambatan dan kendala sebagai berikut:

a) Asistensi dengan pejabat peneliti RKA/DPA dilaksanakan tidak selalu dalam jadwal yang telah ditetapkan;
b) Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan dari SDM dalam sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kecamatan Cicalengka sampai dengan Tahun 2024 tahun berjalan dapat dilihat dalam Tabel T-C. 29

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kecamatan Cicalengka

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	0	0	0	KECAMATAN															
7	1	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7	1	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	dokumen	16	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100%	dokumen	6	dokumen	30	87%
7	1	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16	dokumen	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	dokumen	4	dokumen	16	100%
7	1	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16	dokumen	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	dokumen	4	dokumen	16	100%
7	1	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16	dokumen	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	dokumen	4	dokumen	16	100%
7	1	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	17	dokumen	8	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	dokumen	4	dokumen	16	106%
7	1	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	85%		85%		80%		80%		80%		85%			

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7	1	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	orang/ bulan	58	orang/ bulan	18	orang/ bulan	18	orang/ bulan	100%	orang/ bulan	20	orang/ bulan	96	103%
7	1	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40	dokumen	20	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	dokumen	8	dokumen	32	125%
7	1	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17	laporan	9	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	laporan	4	laporan	14	121%
7	1	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	dokumen	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	dokumen	2	dokumen	10	100%
7	1	1	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	dokumen	1	dokumen	5	100%
7	1	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan					100%		100%		100%		100%			
7	1	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0		0	0	0	orang	0	orang	0%	orang	0	orang	0	0%
7	1	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	orang	140	orang	40	orang	40	orang	100%	orang	50	orang	230	109%
7	1	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41	paket	21	paket	7	paket	7	paket	100%	paket	10	paket	38	108%
7	1	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120	paket	72	paket	24	paket	24	paket	100%	paket	24	paket	120	100%
7	1	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65	paket	39	paket	13	paket	13	paket	100%	paket	13	paket	65	100%

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7	1	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1745	paket	1739	paket	3	paket	3	paket	100%	paket	3	paket	1745	100%
7	1	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	paket	9	paket	3	paket	3	paket	100%	paket	4	paket	16	113%
7	1	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	dokumen	7	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	dokumen	2	dokumen	11	91%
7	1	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	laporan	12	laporan	1	laporan	1	laporan	0%	laporan	0	laporan	13	0%
7	1	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	1	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia	1	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0%	unit		unit	0	0%
7	1	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	0%	unit		unit	2	0%
7	1	1	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	unit	10	unit	0	unit	0	unit	0%	unit	4	unit	14	171%
7	1	1	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	0	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	0%	Sarana		Sarana	0	0%
7	1	1	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	4	Sarana	2	Sarana	1	Sarana	1	Sarana	100%	Sarana		Sarana	3	133%
7	1	1	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0%	unit		unit	0	0%
7	1	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	852	laporan	600	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	600	142%
7	1	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	laporan	9	laporan	3	laporan	3	laporan	100%	laporan	3	laporan	15	100%

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7	1	1	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	unit	2	unit	0	unit	0	unit	0%	unit		unit	2	100%
7	1	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL yang tersedia	30	orang	18	orang	1	laporan	1	orang	100 %	orang	6	orang	25	120%
7	1	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	96,80%		95,63%		96%		99,89%		95,60		96,80			
7	1	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	unit	18	unit	6	unit	6	unit	100 %	unit	6	unit	30	100%
7	1	1	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	unit	15	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	15	100%
7	1	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	unit	6	unit	4	unit	4	unit	100 %	unit	2	unit	12	58%
7	1	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	2	unit	1	unit	1	unit	100 %	unit	1	unit	4	75%
7	1	1	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	1	unit	1	unit	100 %	unit	0	unit	3	67%
7	1	2	2,01	0000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	2	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	laporan	3	laporan	1	laporan	1	laporan	100 %	laporan	1	laporan	5	100%
7	1	2	2,02	0000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7	1	2	2,02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	laporan	3	laporan	1	laporan	1	orang	100 %	orang	1	laporan	5	100%
7	1	2	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	laporan	3	laporan	1	laporan	1	orang	100 %	orang	1	laporan	5	100%
7	1	2	2,03	0000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	2	2,03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100 %	dokumen	1	dokumen	4	100%
7	1	2	2,03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	dokumen	1	dokumen	1	200%
7	1	2	2,04	0000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	2	2,04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	dokumen	0	dokumen	0	0%
7	1	2	2,04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0	laporan	0	laporan	0	dokumen	0	dokumen	0%	dokumen	0	laporan	0	0%
7	1	2	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60	laporan	27	laporan	3	laporan	3	laporan	100 %	orang	12	laporan	42	143%
7	1	3	2,01	0000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	3	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga kemasyarakatan	6	lembaga kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	100 %	Lembaga Kemasyarakatan	1	lembaga kemasyarakatan	11	45%

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7	1	3	2,01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100 %	dokumen	1	dokumen	5	100%
7	1	3	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	laporan	3	laporan	1	laporan	1	laporan	100 %	laporan	1	laporan	5	100%
7	1	3	2,03	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	3	2,03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	lembaga kemasyarakatan	12	lembaga kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	100 %	Lembaga Kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	20	100%
7	1	3	2,03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	8	unit	4	unit	2	unit	2	unit	100 %	unit	2	unit	8	100%
7	1	3	2,03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100 %	laporan	1	laporan	4	100%
7	1	3	2,03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100 %	laporan	1	laporan	4	100%
7	1	4	2,01	0000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	4	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	laporan	3	laporan	2	laporan	2	laporan	100 %	laporan	2	laporan	7	71%
7	1	4	2,01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100 %	laporan	1	laporan	4	75%
7	1	4	2,02	0000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7	1	4	2,02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100 %	laporan	1	laporan	4	100%
7	1	5	2,01	0000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	5	2,01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	542	orang	300	orang	50	orang	50	orang	100 %	orang	21	orang	371	146%
7	1	5	2,01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60	orang	60	orang	0	orang	0	orang	0%	orang	0	orang	60	100%
7	1	5	2,01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	320	orang	160	orang	100	orang	100	orang	0%	orang	100	orang	360	89%
7	1	5	2,01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	38	dokumen	26	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100 %	dokumen	1	dokumen	29	131%
7	1	6	2,01	0000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90%		90%		80%		80%		80%		90%			
7	1	6	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27	dokumen	14	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100 %	dokumen	12	dokumen	38	71%
7	1	6	2,01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	51	dokumen	26	dokumen	24	dokumen	24	dokumen	100 %	dokumen	24	dokumen	74	69%

REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAMES)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2024		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN S.D.TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
7	1	6	2,01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	dokumen	1	dokumen	1	200%
7	1	6	2,01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100 %	dokumen	1	dokumen	5	80%
7	1	6	2,01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	dokumen	0	dokumen	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berkenaan dengan pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, pada pasal 3 Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999, tentang kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, dikatakan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negera yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Hal ini jelas disebutkan bahwa pegawai negeri memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dalam hal pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem administrasi negara yang handal, profesional, efisien dan efektif, dimana ruang lingkup pelayanan publik diberikan oleh aparatur pemerintahan meliputi hal-hal yaitu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan juga merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Cicalengka selaku lembaga teknis harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi dilapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi

tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel T-C. 30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicalengka

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/TUJUAN/SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH			PROYEKSI	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Kecamatan Cicalengka yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai AKIP Kecamatan	66	67	75	76	77	68.81	74.80	76,26	76	77
			Persentase BMD dalam kondisi baik	95.2	95.6	96	96.5	96.8	96.93	95.63	99,89	96.5	96.8
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	88	90	91	86.22	86.69	88,5	90	91
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	80	82	0	0	0	81.08	84.08	0	0	0
			Jumlah Desa yang Cepat Berkembang (mandiri)	3	5	6	8	10	3	5	6	8	10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang didelegasikan Bupati terhadap kecamatan, kecamatan memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai ujung tombak pelayanan terdepan, kecamatan dituntut untuk bisa memberikan pelayan yang maksimal..

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perancanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Resistensi nilai – nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi yang ditandai dengan timbulnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintah.
4. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

7. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi disebabkan antara lain oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efesien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan dan fungsi Pemerintah Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4 Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Penyusunan Renja Tahun 2026 Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renja oleh Camat Cicalengka selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja oleh Bappelida Kabupaten Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renja kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2026-2030 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.

Renja disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pada tahun anggaran 2026 review RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai sebagai berikut :

TABEL T-C.31 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2026 KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

KODE REKENING					RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN
					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (RP)	PENTING
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
7	1	0	0	0	KECAMATAN												
7	1	1	2,01	0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		100%		7.100.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan dan tepat waktu		100 %		10.100.000,00	
7	1	1	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cicalengka	6	dokumen	2.100.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kec. Cicalengka	6	dokumen	2.100.000,00	
7	1	1	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Cicalengka	4	dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kec. Cicalengka	4	dokumen	1.500.000,00	
7	1	1	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cicalengka	4	dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kec. Cicalengka	4	dokumen	1.500.000,00	
7	1	1	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cicalengka	4	dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kec. Cicalengka	4	dokumen	1.500.000,00	
7	1	1	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kec. Cicalengka	4	dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*	Kec. Cicalengka	4	dokumen	1.500.000,00	

						Perubahan DPA-SKPD						*Perubahan DPA-SKPD*				
7	1	1	2,01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan walidata pendukung data statistik sektoral daerah	Kec. Cicalengka	1	dokumen	1.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	Kec. Cicalengka	1	dokumen	1.000.000,00	
7	1	1	2,01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kec. Cicalengka	1	dokumen	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah*	Kec. Cicalengka	1	dokumen	1.000.000,00	
7	1	1	2,02	0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		85%		3.528.656.017,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		85%		4.152.028.000,00	
7	1	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cicalengka	20	orang/ bulan	3.518.056.017,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kec. Cicalengka	20	orang/ bulan	4.146.028.000,00	
7	1	1	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Cicalengka	8	dokumen	2.150.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Kec. Cicalengka	8	dokumen	1.500.000,00	
7	1	1	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cicalengka	4	laporan	2.150.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kec. Cicalengka	4	laporan	1.500.000,00	
7	1	1	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Cicalengka	2	dokumen	3.150.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	Kec. Cicalengka	2	dokumen	1.500.000,00	
7	1	1	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Cicalengka	1	dokumen	3.150.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	Kec. Cicalengka	1	dokumen	1.500.000,00	

7	1	1	2,05	0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan		100%		10.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		10.000.000,00	
7	1	1	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Cicalengka	0	orang	-			Kec. Cicalengka	0	orang		
7	1	1	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Cicalengka	50	orang	10.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Kec. Cicalengka	50	orang	10.000.000,00	
7	1	1	2,06	0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		134.665.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		140.665.000,00	
7	1	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Cicalengka	10	paket	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	10	paket	2.500.000,00	
7	1	1	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Cicalengka	24	paket	44.509.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	24	paket	44.509.000,00	
7	1	1	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Cicalengka	13	paket	8.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	13	paket	8.000.000,00	
7	1	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Cicalengka	3	paket	54.075.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	3	paket	54.075.000,00	
7	1	1	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Cicalengka	4	paket	1.605.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	4	paket	2.605.000,00	
7	1	1	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Cicalengka	2	dokumen	22.976.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	2	dokumen	22.976.000,00	
7	1	1	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cicalengka	0	laporan	1.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kec. Cicalengka	0	laporan	6.000.000,00	
7	1	1	2,07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%		-				100%			

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
7	1	1	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia	Kec. Cicalengka		unit	-			Kec. Cicalengka		unit		
7	1	1	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Kec. Cicalengka		unit	-			Kec. Cicalengka		unit		
7	1	1	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Cicalengka		unit	-			Kec. Cicalengka		unit		
7	1	1	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	Kec. Cicalengka		Sarana	-			Kec. Cicalengka		Sarana		
7	1	1	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Kec. Cicalengka		Sarana	-			Kec. Cicalengka		Sarana		
7	1	1	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Cicalengka		unit	-			Kec. Cicalengka		unit		
7	1	1	2,08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		205.412.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		264.000.000,00	
7	1	1	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cicalengka	1	laporan	-			Kec. Cicalengka	1	laporan		
7	1	1	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Cicalengka	3	laporan	37.572.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	3	laporan	30.000.000,00	
7	1	1	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Cicalengka		unit	-			Kec. Cicalengka		unit		
7	1	1	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL yang tersedia	Kec. Cicalengka	6	orang	167.840.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	6	orang	234.000.000,00	

7	1	1	2,09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		96,80		48.552.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96,80		266.552.000,00	
7	1	1	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Cicalengka	6	unit	24.200.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kec. Cicalengka	6	unit	42.200.000,00	
7	1	1	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Cicalengka	0	unit	-			Kec. Cicalengka	0	unit		
7	1	1	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Cicalengka	2	unit	6.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kec. Cicalengka	2	unit	6.000.000,00	
7	1	1	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Cicalengka	1	unit	18.352.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kec. Cicalengka	1	unit	218.352.000,00	
7	1	1	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Cicalengka	0	unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kec. Cicalengka	0	unit	0,00	
7	1	2	2,01	0000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%		5.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%		5.000.000,00	
7	1	2	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cicalengka	1	laporan	5.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Kec. Cicalengka	1	laporan	5.000.000,00	
7	1	2	2,02	0000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		100%		17.250.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		100%		17.250.000,00	

					yang ada di Kecamatan	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan					Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Dikecamatan guna mendukung Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Kecamatan					
7	1	2	2,02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cicalengka	1	laporan	6.500.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	Kec. Cicalengka	1	laporan	6.500.000,00	
7	1	2	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cicalengka	1	laporan	10.750.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kec. Cicalengka	1	laporan	10.750.000,00	
7	1	2	2,03	0000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%		13.750.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		100%		13.750.000,00	
7	1	2	2,03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Cicalengka	1	dokumen	6.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	Kec. Cicalengka	1	dokumen	6.000.000,00	
7	1	2	2,03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Kec. Cicalengka	1	dokumen	7.750.000,00	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	*Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta*	Kec. Cicalengka	1	dokumen	7.750.000,00	
7	1	2	2,04	0000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%		183.780.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan		100%		150.000.000,00	
7	1	2	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Cicalengka	12	laporan	183.780.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kec. Cicalengka	12	laporan	150.000.000,00	

7	1	3	2,01	0000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%		60.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kedgiatan Pemberdayaan Desa		100%		85.000.000,00	
7	1	3	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cicalengka	1	lembaga kemasyarak atan	15.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Kec. Cicalengka	1	lembaga kemasyarak atan	15.000.000,00	
7	1	3	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cicalengka	1	laporan	25.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kec. Cicalengka	1	laporan	50.000.000,00	
7	1	3	2,03	0000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan		100%		77.750.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan		100%		74.450.000,00	
7	1	3	2,03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Cicalengka	4	lembaga kemasyarak atan	50.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kec. Cicalengka	4	lembaga kemasyarak atan	50.000.000,00	
7	1	3	2,03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Kec. Cicalengka	2	unit	750.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan*	Kec. Cicalengka	2	unit	750.000,00	
7	1	3	2,03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Cicalengka	1	laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kec. Cicalengka	1	laporan	15.000.000,00	
7	1	3	2,03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Cicalengka	1	laporan	12.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	Kec. Cicalengka	1	laporan	8.700.000,00	
7	1	3	2,06	0000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%		2.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%		53.300.000,00	
7	1	3	2,06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Cicalengka	60	keluarga	1.000.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	Kec. Cicalengka	60	keluarga	20.000.000,00	

											Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*				3.000.000,00	
7	1	3	2,06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Cicalengka	80	keluarga	1.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*	Kec. Cicalengka	80	keluarga	30.000.000,00	
											Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*				100.000,00	
											Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*				100.000,00	
											Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*				100.000,00	
7	1	4	2,01	0000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%		46.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*		100%		46.000.000,00	
	1	4	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kec. Cicalengka	2	laporan	23.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal*	Kec. Cicalengka	2	laporan	23.000.000,00	

						dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						*di Wilayah Kecamatan*					
7	1	4	2,01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cicalengka	1	laporan	23.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	Kec. Cicalengka	1	laporan	23.000.000,00	
7	1	4	2,02	0000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%		20.912.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%		20.912.000,00	
7	1	4	2,02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cicalengka	1	laporan	20.912.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	Kec. Cicalengka	1	laporan	20.912.000,00	
7	1	5	2,01	0000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%		82.308.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		100%		82.308.000,00	
7	1	5	2,01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Cicalengka	21	orang	30.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	Kec. Cicalengka	21	orang	30.000.000,00	
7	1	5	2,01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Cicalengka	0	orang	-			Kec. Cicalengka	0	orang		
7	1	5	2,01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat	Kec. Cicalengka	100	orang	23.108.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,*	Kec. Cicalengka	100	orang	23.108.000,00	

					Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*					
7	1	5	2,01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cicalengka	1	dokumen	29.200.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Kec. Cicalengka	1	dokumen	29.200.000,00	
7	1	6	2,01	0000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		90%		93.238.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		90%		93.238.000,00	
7	1	6	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cicalengka	12	dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kec. Cicalengka	12	dokumen	20.000.000,00	
7	1	6	2,01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cicalengka	24	dokumen	30.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Kec. Cicalengka	24	dokumen	30.000.000,00	
7	1	6	2,01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Cicalengka	1	dokumen	-			Kec. Cicalengka	1	dokumen		
7	1	6	2,01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Cicalengka	1	dokumen	43.238.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	Kec. Cicalengka	1	dokumen	43.238.000,00	
7	1	6	2,01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cicalengka	0	dokumen	-			Kec. Cicalengka	0	dokumen		
					Jumlah Total					4.536.373.017,00	Jumlah Total					5.484.553.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 terdapat beberapa isu strategis, salah satunya adalah rendahnya kualitasi implementasi dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencanangkan salah satu agenda pembangunan yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik untuk menyelesaikan isu strategis tersebut.

Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda pembangunan nasional tersebut mencanangkan misi mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip good governance sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep good governance yang masih terus diupayakan, penerapan konsep dynamic governance dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas *e- government* melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dorongan-dorongan terhadap beberapa faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Cicalengka dalam lingkup wilayahnya.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam Prioritas Nasional Prioritas III Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar, dengan arah kebijakan, hal ini sejalan dengan Misi Kabupaten Bandung khususnya MISI 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Untuk menunjang Prioritas Nasional dan Misi Kabupaten Bandung, kecamatan Cicalengka menentukan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
b) Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's);
c) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
d) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
e) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2026 Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan Cicalengka adalah sebagai berikut :

a) Tujuan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
   1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

b) Sasaran Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
   1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi;
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Menyusun rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di kecamatan

TABEL 3.3

TABEL TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CICALENGKA

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Laju IKM			
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Nilai IKM			
1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah 2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			
1.1			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP		
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.7			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu		
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	
1.2.4			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

1.3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD		
1.3.1			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.2			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
1.3.3			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.4			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		
1.4.1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1.4.2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
1.4.3			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	
1.4.4			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

1.4.5			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.5			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.5.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.5.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.5.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	
1.5.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.5.5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1.5.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1.5.7			Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
1.5.8			Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

1.5.9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah		
1.6.1			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
1.6.2			Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1.6.3			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Lainnya yang Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Disediakan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
1.7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.7.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

1.7.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.7.3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.7.4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
1.8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.8.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.8.3			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.8.4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.8.5			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat			
2.1			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
2.1.1			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.1.2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di kecamatan		
2.2.1			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.3			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum		

2.3.1			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	
2.4			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		
2.4.1			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
2.4.2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina			
3.1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
3.1.1			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3.1.2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

3.2			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memilik Desa)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi		
3.2.1			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
3.2.2			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3.2.3			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
3.3			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga		
3.3.1			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
3.3.2			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
3.3.3			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	

3.3.4			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
3.3.5			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
3.3.6			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
3.3.7			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
4.1			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
4.1.1			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.1.2			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
4.2			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
4.2.1			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
5.1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
5.1.1			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

5.1.2			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
5.1.3			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
5.1.4			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
5.1.5			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa			
6.1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang dibina dan diawasi		
6.1.1			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
6.1.2			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

6.1.3			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.4			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.5			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
6.1.6			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6.1.7			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.1.8			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Cicalengka adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik yang Cepat dan Tepat Sasaran Kepada Masyarakat dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2026 ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang anggarannya diperuntukan untuk belanja perencanaan dan pelaporan serta Belanja Pegawai. dan Program lainnya yang anggarannya terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Cicalengka, dalam Rencana Kerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 direalisasikan melalui program dan kegiatan yang tergambar pada Tabel T-C. 33 dibawah ini.:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KECAMATAN CICALENGKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN CICALENGKA						5.663.025.261,00							6.039.444.017,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.663.025.261,00							6.039.444.017,00	
	7,01	KECAMATAN						5.663.025.261,00							6.039.444.017,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-			60.5 poin	4.843.345.000,00						-	5.349.944.017,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah]	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	62	-	-	60	4.843.345.000,00	-	-	-	-	-	-	5.349.944.017,00	-
				80	50	50,50	78									
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85	75	76	99,89									
			Nilai AKIP	99,89	96	99,89										
			Persentase aset BMD dalam kondisi baik													
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-			78 POIN	10.100.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka	-	17.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen				6 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Bandung,	PENDAPATAN	Memperkua	Reformasi	Pegawai Kecamatan		2.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

			Perencanaan Perangkat Daerah						Cicalengka, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)	t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Cicalengka			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		2.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		2.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

											serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		2.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		2.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

											judi, dan pe nyeludupan .					
	7.01.01.2.01.0 008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1.000.00 0,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamata n Cicalengk a		2.500.000, 00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.01.0 009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				12 Data	1.000.00 0,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamata n Cicalengk a		2.500.000, 00	KECAMATAN CICALENGKA

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	-			100 %	4.152.028.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka	-	4.734.056.017,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	4.146.028.000,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		4.718.056.017,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				8 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		3.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		3.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		4.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		4.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka	-	12.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	10.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		12.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	140.665.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka	-	144.976.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		3.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	44.509.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		45.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	8.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		9.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	54.075.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		54.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2.605.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		2.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	22.976.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		22.976.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		8.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	264.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka	-	236.412.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		38.572.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	234.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		197.840.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	266.552.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka	-	205.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	42.200.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		25.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		10.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	218.352.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		20.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Pegawai Kecamatan Cicalengka		150.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			91 poin	237.772.261,00						-	226.000.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100 95	100 88	100 90	100 91	237.772.261,00	-	-	-	-	-	-	226.000.000,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka	-	8.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		8.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Dikecamatan guna mendukung Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Kecamatan	-			100 %	19.022.261,00			-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	-	-	18.250.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	-		7.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	12.522.261,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	-		11.250.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	-			100 %	13.750.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a	-	14.750.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.02.2.03.0 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		6.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.02.2.03.0 002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	7.750.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		8.250.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	-			100 %	200.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a	-	185.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.02.2.04.0 003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		185.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa yang cepat berkembang	-			10 desa	339.450.000,00						-	203.500.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat]	Jumlah Desa Mandiri Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100 12	100 6	100 8	10 100	339.450.000,00	-	-	-	-	-	-	203.500.000,00	-

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kedgiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	135.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a	-	63.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.01.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga K emasyarak at an	15.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		16.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.01.0 002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		21.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.01.0 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		26.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	-			100 %	74.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka	-	81.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		51.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				2 Unit	750.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		1.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		16.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	8.700.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		13.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-			100 %	130.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a	-	59.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.06.0 003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		22.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.06.0 005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				25 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		3.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.06.0 006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	30.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		30.500.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		1.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				10 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		1.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				10 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		1.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-			91 %	66.912.000,00						-	75.000.000,00	
		[Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100 95	100 88	100 90	100 91	66.912.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00	-

		tenteram dan tertib]														
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	46.000.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a	-	50.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.04.2.01.0 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	23.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		25.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.04.2.01.0 002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	23.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		25.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			100 %	20.912.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a	-	25.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.04.2.02.0 001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	20.912.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		25.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-			100 % 91 %	82.308.000,00						-	86.000.00 0,00	
		[Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 95	100 88	100 90	100 91	82.308.000,00	-	-	-	-	-	-	86.000.00 0,00	-

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	82.308.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a	-	86.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.05.2.01.0 002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				21 Orang	30.000.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		31.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.05.2.01.0 004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	23.108.000,00	Kab. Bandu ng, Cicale ngka, Semua Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarak at Cicalengk a		25.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.05.2.01.0 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	29.200.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		30.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang cepat berkembang	-			10 desa	93.238.000,00						-	99.000.00 0,00	
		[Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan]	Jumlah Desa Mandiri Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100 12	100 6	100 8	10 100	93.238.000,00	-	-	-	-	-	-	99.000.00 0,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	93.238.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka	-	99.000.00 0,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		22.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		32.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	43.238.000,00	Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Cicalengka		45.000.000,00	KECAMATAN CICALENGKA
	J U M L A H							5.663.025.261,00							6.039.444.017,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Cicalengka didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke-4) yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan

Rencana kerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 mencakup 6 program, terdiri 16 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
   a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 10.100.000,00 yang terdiri dari:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dianggarkan sebesar Rp 2.100.000,00 untuk SPPD dan belanja Photo Copy:
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk SPPD Dalam dan Luar Daerah, Rapat Koordinasi serta biaya penginapan;
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk SPPD dan belanja Photo Copy:
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk SPPD dan belanja Photo Copy:
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk SPPD dan belanja Photo Copy;
      6) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, dianggarkan sebesar Rp 1.000.000,00;
      7) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, dianggarkan sebesar Rp 1.000.000,00.

   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 4.152.028.000,00 yang terdiri dari :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dianggarkan sebesar Rp 1.146.028.000,00 untuk gaji dan tungjangan ASN.
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk perjadin dan photocopy dokumen;
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk perjadin dan photocopy dokumen;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk perjadin dan photocopy dokumen;
5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,00 untuk perjadin dan photocopy dokumen.

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 yang terdiri dari :

1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 untuk kegiatan Sosialisasi.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 140.665.000,00 yang terdiri dari :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00 untuk pembelian alat-alat listrik;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dianggarkan sebesar Rp 44.509.000,00 untuk pembelian Alat Tulis Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dianggarkan sebesar Rp 8.000.000,00 untuk pembelian alat dan bahan-bahan kebersihan;
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dianggarkan sebesar Rp 54.075.000,00 untuk pembelian makan dan minum tamu serta rapat koordinasi dengan desa;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dianggarkan sebesar Rp 2.605.000,00 untuk pencetakan barang cetakan;

6) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dianggarkan sebesar Rp 22.976.000,00 untuk pembelian bahan bacaan dan media cetak lainnya;
7) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD, dianggarkan sebesar Rp 6.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas sekretariat.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, belum teranggarkan

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 264.000.000,00 yang terdiri dari :
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 untuk pembayaran rekening listrik dan rekening telepon;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dianggarkan sebesar Rp 234.000.000,00 untuk Gaji dan tunjangan kesehatan PHL.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 266.552.000,00 yang terdiri dari :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dianggarkan sebesar Rp 42.200.000,00 untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dianggarkan sebesar Rp 6.000.000,00 untuk perawatan peralatan dan mesin kantor;
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp 218.352.000,00 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, belum dianggarkan.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 yang terdiri dari :

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 untuk perjadin dalam daerah selama 1 tahun

b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 19.022.261,00 yang terdiri dari:

1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp 6.500.000,00 untuk perjadin dalam kota selama 1 tahun;
2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp 12.522.261,00 untuk pembelian makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam kota.

c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanana Umum

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 13.750.000,00 yang terdiri dari:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dianggarkan sebesar Rp 6.000.000,00 untuk perjadin dalam kota selama 1 tahun;
2) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak swasta. Dianggarkan sebesar Rp 7.750.000,00 untuk perjadin dalam kota selama 1 tahun

d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,00 untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, dan keolahragaan selama 1 tahun.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 135.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00 untuk kegiatan fasilitasi Musrenbang desa;
2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 untuk Rapat koordinasi serta perjalanan dinas dalam kota;
3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00 untuk Rapat koordinasi serta perjalanan dinas dalam kota.

b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 74.450.000,00 yang terdiri dari:

1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota;
2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan, dianggarkan sebesar Rp 750.000,00 untuk pembelian sarana kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan.
3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota.

4) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dianggarkan sebesar Rp 8.700.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota.

c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 130.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota;
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah, dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota;
3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota;
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota;
5) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota;
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 untuk pembelian makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam kota.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 46.000.000,00 yang terdiri dari:

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp 23.000.000,00 untuk Perjadin dan Mamin anggota.
2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dianggarkan sebesar Rp 23.000.000,00 untuk Perjadin dan Mamin anggota.

b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 20.912.000,00 yang terdiri dari:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dianggarkan sebesar Rp 20.912.000,00 untuk Mamin dan Perjadin anggota.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 82.308.000,00 yang terdiri dari:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 untuk belanja pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional;
2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional, dianggarkan sebesar Rp 23.108.000,00 untuk belanja Mamin dan perjadin koordinasi kewilayahan
3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dianggarkan sebesar Rp 29.200.000,00 untuk belanja Mamin dan perjadin koordinasi dengan Muspika Kecamatan Cicalengka.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 93.238.000,00 yang terdiri dari:

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 untuk biaya Sosialisasi Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 untuk biaya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, sebesar Rp 43.238.000,00 untuk biaya Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi kecamatan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 memiliki tujuan utama untuk mendorong terciptanya proses perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terarah, dan profesional. Perencanaan ini merupakan bagian integral dari upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cicalengka Tahun 2021–2026. Dalam implementasinya, setiap program dan kegiatan pembangunan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas dalam pencapaian hasil, transparansi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, akuntabilitas terhadap hasil yang dicapai, serta menjamin partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Cicalengka.Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Cicalengka tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.
4. Rencana Kerja Kecamatan Cicalengka Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (Renja) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).
6. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cicalengka Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diikuti, diketahui, dan dipahami oleh masyarakat. Prinsip transparansi ini menuntut adanya keterbukaan informasi, akses yang mudah, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Agar setiap keputusan atau kebijakan publik dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan secara efektif, maka keterlibatan masyarakat harus dimulai sejak tahap awal, baik dalam proses perencanaan maupun dalam

perumusan kebijakan. Dengan demikian, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat dapat terakomodasi dengan tepat di dalam kebijakan tersebut. Konsep ini sejalan dengan gagasan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan sistem informasi dan komunikasi yang jelas, cepat, dan mudah diakses, sehingga menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya demokratisasi dalam setiap proses perumusan dan pengambilan keputusan publik. Dengan penerapan transparansi yang baik, diharapkan tercipta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta terbangun akuntabilitas yang kuat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme control dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Cicalengka, Juli 2025

CAMAT

TTD

CUCU HIDAYAT

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA